

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi di era globalisasi mendorong pemerintah terus menerus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Pada era informasi dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan global.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penerapan *e-government*. Penerapan *e-government* didasarkan pada Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Kebijakan *e-government* dilakukan dengan memaksimalkan manfaat dari kemajuan sistem informasi untuk mewujudkan *good governance*.

Salah satu bentuk dari penerapan dari *e-government* adalah *e-procurement*. *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi dan transaksi elektronik (Perpres No.4/2015). Sistem *e-procurement* mengacu pada penggunaan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet untuk melaksanakan tahapan proses pengadaan termasuk negoisasi, pemesanan, penerimaan, dan *review* pasca pembelian (Croom dan Brandon, 2005). Secara garis besar implikasi pengadaan secara elektronik adalah terciptanya transparansi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengadaan, tercapainya mutu barang/jasa,

meningkatkan jumlah dan kompetisi vendor yang sehat, dan memudahkan evaluasi (Nasution, 2012).

Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dijelaskan bahwa penggunaan *e-procurement* adalah belanja pemerintah di atas Rp.200.000.000, untuk pembelian barang, konstruksi dan jasa lainnya, sedangkan di atas Rp.50.000.000, untuk pengadaan jasa konsultasi (kajian). Semua instansi yang berada pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun yang ada di daerah diharuskan mengikuti ketentuan sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 jika melaksanakan pengadaan barang/jasa.

*E-procurement* secara konseptual memiliki keunggulan yang lebih baik dibanding dengan pengadaan barang barang dan jasa secara konvensional. Keunggulan *e-procurement* tidak terbatas pada proses yang transparan dan efisien, akan tetapi berdampak pula terhadap perbaikan tatakelola secara luas sampai pada perbaikan penyedia atau vendor. Perbaikan ini terjadi karena hanya para vendor yang potensial dan berkompeten saja yang akan mampu mengikuti praktik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.

Secara teknis, *e-procurement* dilaksanakan oleh LPSE dimana tugasnya secara ringkas adalah membuat pengumuman, mengunggah dokumen lelang, menerima penawaran, melakukan penilaian dan menentukan pemenang. Semua proses ini merupakan reformasi signifikan atas pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan lembaga pemerintah karena pemasok tak perlu lagi mengantar atau bertatap muka dengan para penyedia dalam hal ini Tim LPSE.

Penyelenggaraan yang baik hanya dapat diperoleh bila didapat partisipasi penyedia atau vendor yang maksimal. Partisipasi ini secara kuantitas ditentukan atas jumlah vendor yang memberikan penawaran. Kepercayaan vendor menjadi salah satu penentu. Pengalaman empiris dalam pengadaan barang dan jasa khususnya berkaitan dengan lembaga pemerintahan menunjukkan adanya praktik yang tidak baik, didapat indikasi penyuapan untuk mendapatkan satu paket pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilaporkan oleh *e-procurement watch* yang melakukan penelitian di Cirebon dimana 95 persen responden mengatakan bahwa untuk memperoleh kesempatan vendor barang dan jasa harus mengeluarkan dana terlebih dahulu. Sehingga, salah satu dampak dari pada pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* adalah munculnya resistensi yang mengakibatkan vendor tidak akan mendapatkan kesempatan dalam proses penawaran.

Sebagai satu produk, *e-procurement* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi teknis dan manajemen. Dari sisi teknis berkaitan dengan kompetensi penyedia dan pengguna dalam hal ICT. Dalam kaitan ini ada kekhawatiran, bahwa kompetensi pengguna yang tidak memadai akan mengurangi jumlah pemasok yang mengikuti proses *e-procurement*. Rose, C. R dkk (2009) melaporkan hasil penelitian di Malaysia tentang penerimaan penyelenggaraan *e-procurement* yaitu persepsi pemasok tentang kebermanfaatan, kepastian, fasilitas dan kemudahan penggunaan; berpengaruh terhadap penerimaan *e-procurement*.

Permasalahan umum yang terjadi pada penggunaan sistem *e-procurement* pada pemerintah daerah di Indonesia, juga terjadi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu minimnya penggunaan sistem *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa. Data asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) tahun 2013 menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat hanya sebesar 12,5% dari total keseluruhan pengadaan barang/jasa yang dilakukan. Penerapan sistem *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat mulai dilakukan secara penuh dilaksanakan pada tahun 2011. Objek pada penelitian ini adalah penyedia barang/jasa atau vendor yang menggunakan sistem *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan penyedia barang/jasa merupakan *stakeholder* yang paling penting untuk memastikan keberhasilan dilaksanakannya sistem *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat.

Minimnya penggunaan sistem informasi pada pemerintah daerah diikuti dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa memiliki keterkaitan terhadap minat perilaku individu dalam menggunakan sistem informasi. Minat perilaku merupakan keinginan seseorang dalam menggunakan sistem informasi (*e-procurement*). Menurut Hartono (2008), penyebab terbesar kegagalan penerimaan sistem informasi bukan disebabkan oleh kualitas teknis maupun informasi yang dihasilkan akan tetapi kegagalan lebih kepada aspek keperikuan. Tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi terkait pada perubahan yang terjadi dengan diterapkannya sistem informasi berupa minat individu yang menyebabkan penolakan sistem informasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini berfokus pada antesedan-antesedan yang menimbulkan minat dan perilaku individu dalam menerima dan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Keberadaan sistem informasi tidak selamanya diterima secara positif oleh individu. Munculnya penolakan individu seperti keluhan dalam penggunaan sistem informasi, kesulitan menggunakan sistem informasi dan kurangnya pemahaman individu dalam menggunakan sistem informasi individu merupakan faktor yang memengaruhi minat individu dalam menggunakan sistem informasi. Berbagai teori keprilakuan (*behavioral theory*) banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi, penerimaan individu, dan kesuksesan implementasi sistem informasi berbasis teknologi.

Banyak model untuk mengevaluasi penerimaan penggunaan (*user acceptance*) suatu teknologi baru. Venkatesh *et al.* (2003) mengusulkan suatu model, yaitu teori penyatuan penerimaan dan penggunaan teknologi yang selanjutnya digunakan bahasa aslinya, yaitu *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Dalam model UTAUT, terdapat faktor-faktor penentu yang bertindak sebagai dasar bagi individu ke arah penggunaan sistem informasi berbasis teknologi tertentu yang pada akhirnya akan menentukan minat dan perilaku penggunaan.

Minat merupakan penyebab individu melakukan tindakan nyata yaitu tindakan penggunaan (Al-Awadhi dan Morris, 2008). Venkatesh *et al.* (2003), dalam model UTAUT, membangun konstruk utama ekspektansi kinerja (*performance expectancy*), ekspektansi usaha (*effort expectancy*) dan pengaruh sosial (*social influence*). Konstruk tersebut merupakan faktor penentu dari minat keprilakuan (*behavioral*

*intention*) dan minat berperilaku ini akan mempengaruhi perilaku penggunaan (*use behavior*). Kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) juga merupakan konstruk utama yang mempengaruhi perilaku penggunaan.

Berdasarkan fenomena diatas, hal ini menjadi dasar pentingnya untuk dilakukan penelitian tentang evaluasi implementasi *e-procurement* yang telah berjalan saat ini dari para pengguna atau vendor yang terkait dengan program tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengguna *e-procurement* dengan judul : “Analisi Keperilakuan Penyedia Barang/Jasa (Vendor) Dalam Menggunakan Sistem Pengadaan Elektronik (*E-Procurement*)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana minat dan perilaku penggunaan penyedia barang/jasa (vendor) dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dengan menggunakan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*)?
- b. Apakah ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, kualitas sistem, kualitas informasi berpengaruh terhadap minat berperilaku penyedia barang/jasa (vendor) dalam menggunakan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) ?
- c. Apakah minat berperilaku dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap perilaku penggunaan penyedia barang/jasa (vendor) dalam menggunakan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dilakukannya penelitian. Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui minat dan perilaku penggunaan penyedia barang/jasa (vendor) dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dengan menggunakan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*)?
- b. Untuk menguji pengaruh ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, kualitas sistem, kualitas informasi terhadap minat berperilaku penyedia barang/jasa (vendor) dalam menggunakan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) ?
- c. Untuk menguji pengaruh minat berperilaku dan kondisi yang memfasilitasi terhadap perilaku penggunaan penyedia barang/jasa (vendor) dalam menggunakan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*)

### 1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan perusahaan. Kontribusi pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Kontribusi teoritis pada penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai mengenai determinan yang memengaruhi minat dan perilaku dalam menggunakan *e-procurement*, bahwa ekspektansi kegunaan, ekspektansi usaha, kualitas sistem, kualitas informasi dan kondisi yang memfasilitasi merupakan determinan yang dapat

menjelaskan dan memprediksi minat perilaku dalam menggunakan sistem informasi. Selain itu, UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan fenomena penerimaan dan penggunaan sistem informasi oleh penggunanya.

Kontribusi praktisi pada penelitian dapat memberikan informasi dan gambaran atas faktor-faktor pendorong keberhasilan penerapan *e-procurement*. Faktor-faktor tersebut dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi vendor dalam mengaplikasikan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi *e-procurement*. Sedangkan untuk pihak LPSE Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat memberi masukan dalam merumuskan strategi penerapan pengadaan secara elektronik untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna *e-procurement* atau vendor.